

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK DI INDONESIA

Djoys Anake Rantung

Universitas Kristen Indonesia

Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen

djoys.anneke@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Agama Kristen (PAK) merupakan suatu proses pembelajaran mengenai koinonia, yaitu kehidupan persekutuan komunitas iman yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan personal dan sosial di mana satu sama lain. Dalam konteks bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tatanan masyarakat majemuk, PAK diharapkan mampu memberikan pencerahan agar manusia menghormati kehidupan personal dan sosial dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

PAK dalam kehidupan masyarakat majemuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman atas salah satu aktivitas masyarakat majemuk dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yaitu dalam hal aktivitas politik atau kegiatan proses berpolitik. Peran PAK dalam memberikan pengetahuan kepada komunitas orang percaya Kristus agar tidak anti politik dan mau ikut terlibat dalam proses berpolitik. Komunitas orang percaya Kristus dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik.

Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (kota-negara), dan secara alamiah kecenderungan manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan secara berkelompok. Dengan demikian, maksud dan tujuan politik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh manusia dan kelompoknya.

Kemajemukan adalah ciri khas bangsa Indonesia yang beragam/berbeda terutama perbedaan suku, agama, adat istiadat sampai perbedaan kepentingan. Pendidikan Agama Kristen dan Politik di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat majemuk. Esensi (PAK) dan politik adalah komunitas suatu masyarakat atau bangsa yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu atau pemerintahan tertentu.

Hubungan esensi politik dan esensi koinonia tersebut adalah segala sesuatu yang didapatkan komunitas iman dalam pembelajaran dan pengalaman berjemaat dan bergereja dapat menjadi contoh maupun sumbangan bagi proses berpolitik di tengah kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dalam suatu pemerintahan. Hal yang lebih berkembang dalam hubungan esensi politik dan koinonia adalah nilai-nilai kebersamaan komunitas iman di Indonesia di dalam bergereja menjadi misi gereja yang diwujudkan dalam persekutuan politik yang lebih luas di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.

Kata Kunci: Majemuk, Pendidikan Agama Kristen, Politik

Pendahuluan

Kemajemukan adalah ciri khas bangsa Indonesia yang beragam/berbeda terutama perbedaan suku, agama, adat istiadat sampai perbedaan kepentingan. Pendidikan Agama Kristen dan Politik di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat majemuk. Esensi Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan politik adalah komunitas suatu masyarakat atau bangsa yang hidup bersama dalam suatu tempat tertentu atau pemerintahan (kerajaan/negara) tertentu.

Allah mencintai kemerdekaan dan perjuangan seluruh warga bangsa Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda tanpa memisahkan Indonesia berdasarkan etnis atau agama tertentu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara teologis, bangsa Indonesia dengan berbagai latar belakangnya yang berbeda baik suku, etnis, agama, dst, merupakan bagian dari pekerjaan Allah dengan rencana-Nya yang memerdekakan dan membebaskan, sehingga persatuan dan kesatuan haruslah dipelihara dan diperjuangkan atau dipertahankan. Pengakuan bersama bangsa Indonesia bahwa “dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya”. Pernyataan ini adalah pernyataan sikap bangsa Indonesia yang menyatakan rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan bersama.

Gereja memiliki aspek persekutuan atau koinonia. Esensi koinonia dalam kekeristenan adalah suatu komunitas beriman orang yang percaya pada Kristus yang hidup bersama sebagai pengikut Kristus. Aspek persekutuan yang disebut koinonia merupakan aspek yang berhubungan dengan politik. Koinonia dalam kekeristenan adalah suatu komunitas beriman percaya Kristus yang hidup bersama sebagai pengikut Kristus.

Hubungan esensi politik dan esensi koinonia tersebut adalah segala sesuatu yang didapatkan komunitas iman dalam pembelajaran dan pengalaman berjemaat dan bergereja dapat menjadi contoh maupun

sumbangan bagi proses berpolitik di tengah kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dalam suatu pemerintahan. Hal yang lebih berkembang dalam hubungan esensi politik dan koinonia adalah nilai-nilai kebersamaan komunitas iman di Indonesia di dalam bergereja menjadi misi gereja yang diwujudkan dalam persekutuan politik yang lebih luas di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.

PAK menjadi media yang dapat membangun persekutuan yang kuat dengan sesama manusia, baik sesama komunitas kekristenan maupun di luar kekristenan. PAK memberikan gambaran bahwa manusia sebagai makhluk personal dan sosial merupakan sebuah gambaran dari Allah Tritunggal yang merupakan person yang berbeda-beda tetapi satu keberadaan yang “mutual indwelling,”¹ “yang berada dalam hubungan yang harmonis antara Tiga Pribadi yang sederajat, yang masing-masing memiliki fungsi serta wewenang tertentu.”² Oleh karena itu penulis melihat komunitas iman percaya (orang Kristen) tidak terjebak dalam kehidupan yang *eksklusif* yang hanya berperan di seputar komunitas iman orang percaya/gereja saja. Orang Kristen sebagai makhluk sosial seharusnya berperan-serta dan memperlihatkan partisipasinya yang harmonis di tengah masyarakat majemuk dalam percaturan politik di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan komunitas orang percaya, PAK bertujuan dapat membuat orang-orang Kristen memiliki persekutuan pribadi yang kuat dengan Kristus, dapat meneladani teladan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Orang percaya mendapatkan pengetahuan secara *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* dengan benar mengenai iman percaya kepada Kristus sehingga orang-orang Kristen tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, mampu menghadapi pergumulan

¹ Michael Hill, *The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics*, (Australia: Matthias Media, 2001), 80.

² Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah*, terj. Liem Sien Kie (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 107.

kehidupan, mampu menangkal berbagai macam tantangan zaman/ perubahan zaman yang berkembang dengan sangat cepat, dan mampu bersikap bijaksana dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan hikmat Allah melalui Firman Allah dalam Alkitab dalam “percaturan politik”. PAK dapat membuat orang-orang Kristen memiliki persekutuan komunitas yang harmonis, tidak saling bertentangan, dan saling membangun. Keharmonisan ini dapat jelas terlihat diantara sesama orang percaya sekalipun memiliki kanggotaan jemaat yang berbeda-beda/berlainan sinode atau keanggotaan gereja yang beraneka-ragam.

Kekuatan persekutuan komunitas orang percaya Kristus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya Kristus dengan sangat jelas. Dalam hubungannya dengan orang-orang yang belum percaya Kristus atau orang-orang selain Kristen dapat memperlihatkan bahwa Allah mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Orang Kristen harus menyadari bahwa orang Kristen berada di bumi ciptaan Allah dan tetap milik Allah dan tinggal bersama dengan saudara sesama ciptaan Allah dan milik Allah yang sama juga.³ PAK memberikan pemahaman kepada orang percaya Kristus sesuai dengan Kejadian 1:1 “Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” bahwa keberadaan bumi dan warga Indonesia secara Alkitabiah teologis adalah seluruh warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang etnis, agama dan perbedaan lainnya merupakan ciptaan Allah yang sama. Allah yang hidup adalah Allah dari alam semesta, Allah dari seluruh ciptaan,

dan bukan semata-mat Allah dari umat pilihan-Nya.⁴

Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah dan sebagai gambar Allah, manusia merupakan makhluk personal dan sosial sama seperti Allah.⁵ PAK memberikan pengajaran bahwa orang Kristen dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, budaya, suku, dan bahasa di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari. PAK menjadi alat komunikasi bagaimana melihat realitas perbedaan dan bagaimana sebenarnya menghormati dan menghargai masyarakat majemuk. PAK menumbuhkan kesadaran bahwa orang lain merupakan bagian integral dalam suatu kehidupan masyarakat majemuk dan orang percaya Kristus dapat mengakui kehadiran orang lain yang berbeda-beda. PAK memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ada adalah karena manusia mempunyai keunikan masing-masing, eksis sebagai seorang pribadi yang memiliki kemampuan berpikir, merasakan, percaya, memilih, melakukan, dan lain-lain.⁶ Hoekema mengemukakan pemikirannya mengenai manusia yang merupakan ciptaan dan pribadi. Manusia bukan sekedar sebuah ciptaan; ia juga adalah satu pribadi. Menjadi satu pribadi berarti memiliki suatu bentuk kemandirian-bukan mutlak tetapi relative. Menjadi satu pribadi berarti mampu membuat keputusan, menetapkan tujuan, dan bergerak ke arah tujuan-tujuan itu. Ini berarti memiliki kebebasan; setidaknya dalam arti ia mampu membuat pilihan-pilihannya sendiri.⁷

PAK dan Politik dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia perlu untuk diperjuangkan dalam mewujudkan perintah Tuhan. Sebagai pertanyaan bahwa apakah gereja membutuhkan dunia politik atau dunia politik membutuhkan gereja? Atau keduanya sebagai simbiosis mutualisme?

³ Saut Sirait, *Theologi Kenegaraan: Negara Dalam Rancangan Tuhan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), ix.

⁴ John Stott, *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer*, terj. G.M.A Nainggolan (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005), 5

⁵ Hill, *The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics*, 81.

⁶ Hill, *The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics*, 82.

⁷ Anthony Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*, terj. Irwan Julianto (Surabaya: Momentum 2000), 8.

Bagi dunia politik bukanlah hal yang asing untuk memberdayakan segala peluang dan kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gereja haruslah bersikap menjadi gereja yang membawa amanat Tuhan Yesus untuk kesejahteraan, kebenaran, keadilan, perdamaian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

PAK dan Politik dalam masyarakat Majemuk di Indonesia

Pengertian Politik

Kata Politik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya), dan cara bertindak/kebijaksanaan (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Etimologi (asal mula) istilah politik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani dari judul sebuah buku karya Aristoteles *Politics* (*politika*) yang berarti “urusan kota”.⁸ Istilah lainnya dalam bahasa Yunani (*politikos*) berarti “dari, oleh, dan untuk warga negara”, “sipil”, “kenegaraan”, serta bahasa Yunani (*polis*) yang berarti “kota”.⁹

Istilah politik memiliki akar kata *polis* yang artinya “kota” atau “negara”. Dari kata *polis* timbul kata *polites*, yang berarti “penduduk kota” atau “warga negara”. Kata kerja Yunani *politeuomai* berarti “memerintah atau mengatur negara”. Dari kata tersebut muncul derivatifnya, *politike*, yang berarti “tanggung jawab warga negara terhadap negaranya”. Pengertian mengenai tanggung jawab warga negara terhadap negaranya disebut *politike episteme*. *Episteme* secara harafiah berarti pengertian atau pengetahuan. Sedangkan cara-cara untuk menggalang kekuatan atau menghimpun

dukungan dalam rangka menjalankan negara atau mempengaruhi jalannya negara disebut *politikhe tekhnē*. Dalam istilah yang terakhir inilah kata politik sering mendapatkan konotasi negative, karena teknik berpolitik sering mengabaikan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh dukungan.¹⁰

Berdasarkan arti kata dan etimologi politik, maka politik memiliki pengertian segala sesuatu tindakan/keputusan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan kota. Tujuan politik adalah untuk kepentingan masyarakat/warga negara dan untuk suatu kebaikan dan keadilan. Namun pada kenyataannya dan perkembangannya, tujuan politik mengalami perkembangan yang semakin meluas dan dapat berdampak negatif, tidak lagi memikirkan kepentingan masyarakat untuk tujuan suatu kebaikan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat/kota, melainkan politik sering digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja (misalnya bertujuan hanya untuk kepentingan partai politik).

Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk-makhluk polis (kota-negara), dan secara alamiah kecenderungan manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok dan secara berkelompok. Dengan demikian, maksud dan tujuan politik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh manusia dan kelompoknya. Ada dua hal yang dapat dipahami dalam kegiatan berpolitik, yang pertama, sebagai bentuk kemampuan manusia untuk hidup bersama di dalam sebuah polis (kota-negara) di mana ia hidup dengan siapa pun. Dan dalam pengertian kedua, politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan politis. Dalam pengertian kedua ini, kepentingan-kepentingan pribadi sudah sangat mewarnai dan dalam hal inilah arti dan istilah politik mengalami penghambatan makna.¹¹

⁸ Hedi Sasrawan,

<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/01/asal-mula-politik-artikel-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017 Pukul. 08.00 WIB.

⁹ Ibid.

¹⁰ Bambang Subandrijo dan Tim, *Agama dalam praksis*, (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003), 146

¹¹ <https://bless4bliss.wordpress.com/2012/19>, diakses 18 Oktober 2017.

Tujuan PAK terhadap Politik

Pendidikan agama Kristen bertujuan untuk menyatakan kehendak Allah dengan mengajarkan, mendidik, membina, menasihati dan menuntun warga gereja atau warga kristiani maupun nara didik untuk mengenal Allah dan kehendakNya, menyatakan kasih, pengampunan, perdamaian, keadilan, kebenaran dalam mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagaimana maksud dan tujuan Kristus dalam memproklamasikan pekerjaanNya di tengah dunia dan sesama manusia. Yesus menyatakan bahwa “Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk mem-beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (band. Lukas 4:18-19; Yesaya 61:1-2; Matius 13:57; Markus 6:4; Yohanes 4:44).

Politik bukanlah berlawanan dengan tujuan PAK, sebab pengertian dan penjabaran politik dapat ditemui dalam Alkitab sebagai wujud perintah Allah. Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat (polis, kota) yang terbaik. Plato dan Aristoteles menyadari bahwa politik adalah alat atau cara yang dipakai untuk menciptakan kondisi masyarakat yang terbaik. Kondisi terbaik dimana tercapai kesejahteraan yang maksimal, kebebasan mengekspresikan hak-hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang tertib dan beradab. Dalam Alkitab, Tuhan memberi perintah kepada umat Israel yang saat itu dibuang ke Babel untuk mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka berada. Yeremia 29: 11 “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah

kesejahteraanmu”. Perintah Tuhan jelas, usahakanlah kesejahteraan kota atau polis.¹²

Tugas gereja adalah koinonia, marturia dan diakonia, hal ini bertitik tolak dari perintah Tuhan. PAK merupakan suatu proses pembelajaran mengenai koinonia (kehidupan persekutuan komunitas iman) yang di dalamnya memiliki nilai-nilai kehidupan personal dan sosial dimana satu sama lain saling berproses “membagi hidup” dalam konteks bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tatanan masyarakat majemuk memberikan pencerahan agar manusia menghormati kehidupan personal dan sosial dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (berbeda latar belakang kehidupan, budaya, agama, suku, bahasa, dll). PAK dalam kehidupan masyarakat majemuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman atas salah satu aktivitas masyarakat majemuk dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yaitu dalam hal aktivitas politik atau kegiatan proses berpolitik. Peran lainnya adalah dapat memberikan pengetahuan kepada komunitas orang percaya Kristus agar tidak anti politik dan mau ikut terlibat dalam proses berpolitik. Komunitas orang percaya Kristus dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik. Hal ini penting mengingat bahwa sebenarnya lokus teologi yang lebih langsung berhubungan/berkaitan dengan politik adalah aspek persekutuan, yang dikenal dengan koinonia. Komunitas orang percaya seharusnya dapat memperlihatkan bagaimana orang percaya harus hidup bersama di tengah masyarakat majemuk sebagai pengikut Kristus. PAK dalam masyarakat majemuk diharapkan dapat mencegah politisasi agama dan dapat menjauhkan radikalisme atau fundamentalisme agama dari permainan politik. Radikalisme atau fundamentalisme agama dari permainan politik beresiko dapat menggoyahkan

¹² www.suara.kristen.com>opini & analisa, diakses 18 Oktober 2017

fragmentasi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, bahkan kontraproduktif dengan cita-cita membangun tatanan kehidupan demokratis yang didasarkan pada pluralisme/kemajemukan dan kesetaraan.

Menurut Isidorus Lilijawa dalam buku Tujuan politik adalah menyelenggarakan *bonum commune* (kepentingan umum, kesejahteraan bersama) yang berarti memfasilitasi manusia untuk mengusahakan apa yang dibutuhkannya untuk hidup layak secara manusiawi. Hidup layak manusiawi berarti kemudahan untuk memenuhi kebutuhan wajar untuk dapat hidup yang sesuai dengan martabat pribadi manusia. Ini tidak saja diukur menurut pemenuhan kebutuhan pokok melainkan kebutuhan untuk berkembang lebih lanjut. Memenuhi kebutuhan berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena berbagai kebutuhan adalah mutlak; aritnya harus dipenuhi, kalau tidak akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian. Hidup ini sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang.¹³

Kenyataan yang terjadi saat ini tujuan politik menurut Isidorus Lilijawa di atas belum seutuhnya dirasakan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat di Indonesia, kita melihat masih banyak kasus pejabat negara menggunakan uang rakyat hanya untuk memfasilitasi kepentingan pribadi mereka saja. Lebih jelasnya dikatakan oleh Isidorus bahwa tujuan politik yang mulia dan luhur tidak sepenuhnya teraktualisasi dalam kehidupan nyata setiap hari. Bahkan seringkali tujuan mulia itu mengalami pembiasan dalam praktik. Hal ini sangat disebabkan oleh berbagai hal seperti hilangnya roh etis dalam tubuh politik sehingga para politisi bertindak tanpa kontrol etika dan moral. Redupnya fajar nurani oleh 'nafsu' merebut kekuasaan dan mempertahankan pun dengan cara-cara tidak halal memperparah proses pembiasaan itu. Akibatnya, upaya *bonum commune* yang

dicita-citakan bersama justru menjadi malum yang ditimpakan kepada rakyat kecil, prinsip *bonum commune* berubah menjadi *bonum individuum* (kepentingan pribadi)¹⁴

Dapat dikemukakan adanya beberapa tujuan PAK dalam keterlibatan warga gereja dalam politik, yakni: (1) Tujuan pelayanan dan pembebasan; Politik penuh dengan kecenderungan destruktif yang kemudian melahirkan penindasan dan belenggu bagi banyak orang. Dalam konteks itu, gereja terpanggil untuk ikut serta dalam usaha pelayanan/pembebasan yang dilakukan Allah (Lukas 4, Matius 25). Gereja perlu melayani mereka yang menjadi korban permainan politik. Itu arti pertama pembebasan. Pembebasan yang kedua adalah mewujudkan kebebasan dan hak-hak asasi manusia dalam segala lapangan kehidupan, baik agama, pendidikan, pekerjaan, dst. (2) Tujuan missioner; Gereja terpanggil dan perlu berbicara dan bersaksi tentang kebaikan Allah bagi semua manusia. Gereja perlu berbicara tentang kerajaan Allah, memerintahkan Allah, yang mengatasi kekuasaan dan pemerintahan manusia. Kasus kehadiran orang Israel dalam pembuangan di Babel dan pesan nabi Yeremia kepada mereka agar mengusahakan kesejahteraan kota dimana mereka pergi adalah contoh kesaksian di bidang politik (Yeremia 29:1-7). (3) Tujuan korektif; Para nabi dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru selalu melakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik. Tugas koreksi ini dapat dilakukan kalau gereja sendiri mampu memperlihatkan sikap hidup yang baik dan benar. Maka tujuan korektif ini dapat diartikan sebagai tujuan pastoral atau tujuan pengembalaan. Penekanannya memang harus pada segi pastoral. Tujuan pastoral adalah menimbulkan kesadaran akan kasih Allah bagi mereka yang ingin berubah dan menyesali kesalahannya. Misalnya yang dilakukan nabi Natan pada Raja Daud (2 Samuel 12). (4) Tujuan normative; Untuk menegakkan kebenaran di tengah kehidupan

¹³ Isidorus Lilijawa, *Mengapa takut berpolitik ?* (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama, 2007), 39-40

¹⁴ Isidorus Lilijawa, *Mengapa takut berpolitik ?*, 84

politik, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih. Iman Kristen mengakui bahwa segala kuasa ada di tangan Kristus, maka kuasa apapun di dunia ini harusnya mengacu pada kekuasaan Kristus. Maka kekuasaan politik harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih. Dengan kata lain, tujuan keterlibatan gereja dalam politik agar “manusia taat kepada Allah, daripada kepada manusia” (Kisah Rasul 5:29) (5) Tujuan edukatif; Untuk mendidik warga gereja supaya peduli dan paham mengenai tugas panggilannya di dunia. Gereja ada di dalam dunia dan di utus ke dalam dunia (Yohanes 17) dan terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia (Matius 5:13-16). Gereja dan warga gereja adalah warga kerajaan soraga yang ada dan hadir di dunia untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Keterlibatan dalam politik sekaligus berfungsi sebagai pendidikan politik bagi warga gereja.

Hal yang paling pokok adalah inti makna politis yang menjadi bingkai terhadap hal-hal yang disebut di atas adalah Kerajaan Allah yang universal. Makna universal itu menempatkan gereja-gereja dalam keharusan yang terus-menerus untuk memasuki segala ruang dan lorong. Keyakinan utama yang harus dikembangkan adalah bahwa tidak ada ruang yang tertutup bagi gereja untuk menyampaikan keselamatan dari Tuhan, tidak ada budaya yang terlarang dimasuki dan tidak ada batas-batas teritorial berdasarkan etnis, bangsa maupun politis.

Makna persekutuan menjadi begitu mendalam dalam konteks politik alkitabiah dan universalitas Kerajaan Allah itu. Koinonia yang memiliki kesejajarannya dengan polis memperoleh maknanya yang utuh, ketika batas-batas yang multi-dimensi roboh dan terkulai dengan masuknya Injil, berita keselamatan itu. Koinonia atau Polis itu ada dan hidup dengan ciri kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan kesejahteraan yang konkret. Koinonia itu menjadi suatu percontohan (*exemplary*) yang mempersaksikan kehidupan individu yang bebas dan mandiri dengan solidaritas dan kehangatan kasih.

Politik bukanlah tujuan akhir, tetapi alat Tuhan bagi pembebasan manusia. Rumusan dan konsep etika politik adalah dalam kerangka pembebasan Tuhan terhadap kaum tertindas dan lemah menuju keselamatan yang seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya dan selamanya di dalam Kristus. Etika Politik Kristen dengan sendirinya tidak mungkin lepas dari persoalan penderitaan manusia yang dilanda pelbagai bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik.¹⁵

Masalah penindasan dari kekuasaan dan penyalahgunaan fungsi politik selalu terjadi setiap masa. Masalah ini belum akan berakhir selama masih banyak penguasa politik belum menyadari sikap dan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tidak banyak politisi yang sebelumnya memiliki tujuan baik untuk kepentingan masyarakat namun setelah ia menduduki jabatan tertentu di tingkat yang lebih tinggi tidak menutup kemungkinan lupa dengan tujuan semula. Melihat masalah tersebut maka sangat penting gereja melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk mengingatkan para politisi, membebaskan masyarakat yang tidak mendapatkan hak secara adil juga mendidik masyarakat agar tidak dibodohi oleh politisi yang memiliki tujuan destruktif.

Sikap Gereja dalam Politik di Indonesia

Ada pendapat bahwa orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif berpolitik. Memang yang dimaksudkan bukan langsung berpolitik praktis, dalam arti menjadi anggota partai politik dan memperjuangkan aspirasi partai, melainkan *menyoroti dunia politik Indonesia dan mengambil Sikap Politik*. Dalam pendapat ini diasumsikan bahwa pada masa lalu di era Orde Baru orang-orang Kristen dan gereja-gereja kurang ambil peduli terhadap politik. Akibatnya, kepentingan Kristen selalu dirugikan. Maka yang perlu dilakukan pada zaman

¹⁵ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2000), 249-250.

sekarang yang disebut era Reformasi, orang-orang Kristen dan gereja-gereja diminta untuk mengambil sikap baru, supaya dengan demikian kepentingan Kristen lebih diperjuangkan dengan hasil yang lebih baik. Ada sinode-sinode yang membentuk departemen baru, yang disebut “departemen politik” untuk menampung sikap baru ini. Anggota-anggotanya adalah orang-orang yang diperkirakan sudah berpengalaman di bidang politik. Orang-orang Kristen dan persekutuan-persekutuan Kristen entah berbentuk gerejawi maupun non-gerejawi memang harus lebih “sadar politik”, apalagi dalam rangka menghadapi era Reformasi yang penuh dengan gejolak politik akibat krisis perekonomian dan keurusuhan-kerusuhan sosial. Pembahasan mengenai sikap gereja terhadap politik tentunya memiliki hubungan dengan etika politik. Politik adalah seni yang bersangkutan-paut dengan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berbeda-beda kepentingannya, di mana pengambilan keputusan ini menyangkut masa depan orang banyak. Etika politik adalah kaidah-kaidah moral yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan semacam itu.¹⁶

Melihat perkembangan terkini, sikap politik orang Kristen dapat dibagi atas tiga kelompok, yakni: *pertama*, mereka yang *apolitik*, yang menganggap politik sebagai urusan duniawi yang kotor yang tidak perlu dicampuri gereja yang dianggap sebagai lembaga yang mengurus sorga saja. Bagi mereka doa dan ibadah akan menyelesaikan segala masalah. Walau sudah banyak gereja dan warga Kristen di Indonesia yang meninggalkan persepsi ini, namun dalam batas tertentu masih banyak warga gereja yang menganut pandangan demikian. Masih banyak tokoh dan warga gereja yang *apolitik*. Walau gereja bukanlah kekuatan politik, tetapi dia adalah kekuatan moral, namun sikap *apolitik* terlalu ekstrim.

Kedua, adalah *kelompok yang ingin merebut kekuasaan politik*, paling tidak

sedikit mem-punyai kekuatan signifikan dalam struktur pemerintahan agar dapat “menentukan jalannya negeri ini”. Kelahiran berbagai partai politik Kristen belakangan ini mungkin sebagian termasuk pada kategori yang kedua ini. Para pendiri partai Kristen itu barangkali ingin masuk dalam system kenegaraan melalui semangat “beriman dan berharap pada Yesus Kristus”. Jika tidak sekarang, kapan lagi ? Demikian penganut pandangan ini. Agaknya, sikap seperti ini lahir dari pengalaman pahit penganut pandangan ini di masa orang Kristen di Indonesia dianggap sedang dimarginalkan bahkan dianiaya. Untuk membela nasib orang Kristen di Indonesia penganut pandangan ini “bermimpi” untuk masuk dalam struktur kekuasaan dalam rangka menentukan arah pemerintahan. Dari manakah konsep seperti ini masuk dalam gereja-gereja di Indonesia? Pengaruh kelompok fundamentalis-konservatif Kristen di Amerika khususnya yang disebut “Christian Right” atau “Kristen Kanan” amat sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan wawasan seperti ini. Kelompok ini sangat berpengaruh besar terhadap seluruh kebijakan presiden George Bush, khususnya kebijakan luar negeri.

Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa orang Kristen di Indonesia terpanggil sebagai garam dan terang dunia yang melalui iman kristianinya dapat *melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif dan realistik*. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia ada dalam posisi ini. PGI dan gereja-gereja arus utama, sebagaimana diperankan oleh *World Council of Churches* (WCC), dewan gereja-gereja di berbagai Negara lain adalah menjadi kekuatan moral yang dapat melakukan transformasi dan perubahan social melalui konsep, pemikiran, gagasan dan berbagai gerakan. Politik Yesus tergolong kepada sikap ini. Gereja-gereja harus menjadi pengkritik pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang adil. Gereja tidak dapat berdiam diri dalam dinamikan sosial kemasyarakatan.

¹⁶ Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2004), 26- 27

Keterlibatan gereja dalam bidang politik tidaklah semata-mata keterlibatan politik praktis, tetapi terutama sebagai pertanggungjawaban selaku warga masyarakat yang diutus oleh Tuhan untuk ikut menegakkan keadilan dan kebenaran serta kebaikan Allah di dunia. Gereja tidak boleh membiarkan kekuasaan duniawi berkembang ke arah yang cenderung destruktif. Kepedulian atau keterlibatan itu bukan saja untuk mengatasi masalah yang timbul tetapi juga untuk mencegahnya. Gereja terpanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kancah dunia.

Sikap gereja terhadap politik harus ditempatkan dalam pemahaman fundamental dan fungsional atas keberadaannya. Secara *fundamental*, gereja haruslah dipahami sebagai persekutuan orang percaya yang memberikan tanggapan, baik positif maupun aktif, terhadap karya penyelamatan Allah. Oleh sebab itu, segala aktivitas gereja tidak dapat dilepaskan dari makna dan peran soteriologisnya. Karya penyelamatan Allah bagi manusia secara mendasar mengembalikan manusia pada relasi yang benar dengan-Nya. Berelasi secara benar dengan Allah berarti berada dalam damai sejahtera dengan Allah. Itulah yang dilukiskan sebagai kehidupan Firdaus. Sesungguhnya, sejak diciptakan manusia telah dikaruniai kehidupan damai sejahtera itu, bahkan diberi mandat untuk memeliharanya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tugas dan panggilan manusia adalah *memelihara kehidupan karunia Allah* itu. Kejatuhan ke dalam dosa telah merusak semuanya. Sebaliknya, keselamatan memberi kemungkinan bagi pulihnya kondisi itu. Sebagai komunitas yang merespons karya penyelamatan Allah, pada satu sisi gereja adalah komunitas yang telah menerima pemulihan itu; pada sisi yang lain, ia dilibatkan dalam pekerjaan Allah untuk memulihkan relasi seluruh umat manusia dengan-Nya.

Respons positif gereja terhadap karya penyelamatan Allah adalah pengiyaan tanpa syarat (*the unconditional yes*) terhadap kehendak, rencana, dan karya Allah. Itulah hakikat terdalam iman Kristen. Sedangkan

respons aktif diwujudkan dalam seluruh aktivitas kehidupan yang disepadankan dengan kehendak Allah (atau dengan kata lain, kehidupan yang didasarkan pada ketaatan terhadap Allah). Apa pun yang dilakukan gereja dan orang Kristen (idealnya) harus merupakan manifestasi ketaatannya kepada Allah. Hal tersebut diwujudkan dalam seluruh kehidupan.

Salah satu bidang kehidupan yang tidak boleh dipandang sebagai yang duniawi adalah *tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan menegara*. Tak dapat diingkari, pada satu pihak umat Kristen adalah warga Kerajaan Allah, dan pada pihak lain ia adalah warga negara kerajaan duniawi. Sebagai warga negara, wajar bahkan merupakan keharusan, bagi umat Kristen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan negaranya. Dalam pengertian ini, politik bukanlah bidang yang tabu untuk dibicarakan. Sebaliknya, gereja memiliki tanggung jawab untuk melakukan *pendidikan politik* bagi warganya. Artinya, gereja bertanggung jawab untuk membina warganya agar mengerti dan ikut ambil bagian dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal ini harus dibedakan dengan politik praktis yang diperankan oleh partai-partai politik. Gereja tidak bermain politik praktis sebagai partai politik. Keikutsertaan dalam politik praktis merupakan hak masing-masing warga gereja, bukan tugas gereja.

Lembaga keagamaan memiliki karakteristik sebagai kehidupan bersama religius, yang boleh memperhatikan kehidupan politik, namun tanpa ambisi untuk memperoleh kekuasaan politik. Yang harus dilakukan oleh gereja (dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya) adalah mengikuti, mencermati, dan memahami perkembangan kehidupan politik. Berdasarkan pemahaman tersebut, menggembalakan warganya yang berolah politik praktis agar tetap memperhatikan etika dan moralitas mengembangkan warganya secara umum untuk menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan sikap hidup dan perilaku orang beriman; bila perlu, membuat

(mengeluarkan) pernyataan politik dengan asas imamat-rajawi-nabiah, bukan berdasar asas politik praktis.¹⁷

Menurut Saut Sirait dalam bukunya *Politik Kristen di Indonesia* ada beberapa prinsip dan sikap yang harus dimiliki oleh gereja, yakni: Prinsip dan sikap sebagai *pembebas*, berhubung Yahweh adalah pembebas dari penindasan dan perbudakan. Hal serupa juga dilakukan Yesus yang melaksanakan pembebasan terhadap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Menjadi *alternative*, seperti yang diperlihatkan gereja mula-mula dan Israel yang dibentuk sebagai komunitas *alternative*. Solidaritas horizontal menjadi ciri utama, yang mampu mempersatukan dan sekaligus memungkinkan orang-orang lemah dan terbuang membebaskan dirinya secara politis.

Posisi yang *berpihak kepada kaum lemah dan tidak berdaya*. Allah Israel adalah Allah yang dalam konflik-konflik sosial senantiasa menempatkan dirinya di pihak yang tersingkir secara sosial, ekonomis dan politis. Hal itu dengan tegas diperlihatkan Yahweh melalui pengalaman Israel dan ditunjukkan Yesus secara mencolok dalam pelayanan dan pengajaran-Nya. Memiliki *sikap kritis dalam hubungannya dengan negara* sebagaimana ciri pre-state Israel dan ketegasan Yesus terhadap hak raja dan hak Tuhan yang tidak disetarakan dan disatukan. Bahkan dalam kadar dan porsi yang pas dan tepat gereja-gereja pasti melakukan upaya memperlemah dan menjinakkan negara, bila hak Tuhan diklaim raja sebagai haknya. Dengan itu absolutism dan kesakralan atau melekatnya makna keilahian dan kekuasaan raja dihapuskan. Kontrol tetap kekuasaan tidak hanya bersifat politis, tetapi merupakan tugas gereja yang bermakna teologis. Sikap dan pemahaman bahwa *ketertindasan, pemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia bukan persoalan sosial, ekonomis dan politis semata, melainkan persoalan teologis*.

Pemahaman bahwa *gereja adalah untuk dunia*. Yahweh Israel bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Tindakan penyelamatan Yahweh tidak tertuju bagi Israel semata, tetapi seluruh bangsa. Di sini realitas yang pluralistis dalam segala hal merupakan kenyataan yang tidak tertolak. Sebagaimana Israel berfungsi sebagai pengantara, maka gereja-gereja merupakan pengantara tindak penyelamatan Yahweh. Kematian dan kebangkitan Yesus yang merupakan puncak karya penyelamatan Tuhan menjadi pokok utama dalam tugas pengantara keselamatan itu..¹⁸ Sebagai warga Kristen yang tinggal di Indonesia dan berstatus warga negara Indonesia maka untuk menghadapi masa depan, gereja-gereja di Indonesia di samping dorongan kesadaran iman dan pemahaman alkitabiah, juga dipaksa kebutuhan objektif, paling tidak harus mengambil beberapa langkah konkret, yakni: Penyusunan kurikulum pendidikan politik gereja-gereja yang mampu mengangkat dan menghubungkan iman Kristen dengan politik.

Perumusan menyangkut kekuasaan, baik mengenai hubungan gereja dengan negara maupun mengenai persoalan absolutism penguasa/negara dengan pelbagai implikasi politiknya dalam kehidupan warga negara. Penentuan platform politik gereja-gereja, terutama mengenai pemahaman diri gereja berkaitan dengan pluralitas bangsa dan persoalan-persoalan yang dihadapi seperti ketidakadilan, penindasan dan perampasan hak-hak politik. Di sini, kerja sama dengan komponen bangsa, terutama dengan kalangan Islam memerlukan penegasan dan orientasi baru berkaitan dengan persoalan keadilan yang meluas dan menyeluruh.¹⁹

Kehidupan berpolitik adalah suatu proses dari masyarakat atau publik yang saling “membagi hidup” dimana di dalamnya ada pembelajaran bagaimana suatu masyarakat majemuk menjalani kehidupan bersama, yang diatur dalam suatu sistem berbangsa dan bernegara. Sistem berbangsa

¹⁷ Bambang Subandrijo dan Tim, *Agama dalam Praksis*, (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003), 147-149

¹⁸ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2000), 246-247.

¹⁹ Ibid. 248-249.

dan bernegara tersebut memiliki tujuan bentuk, struktur, proses penyelenggaraan negara. Unsur terpenting dalam politik adalah kekuasaan, sehingga politik dimaknai sebagai proses-proses dalam mendapatkan dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Indonesia merupakan negara moderen yang menganut sistem politik berdasarkan pada prinsip demokrasi (definisi demokrasi: keseimbangan kekuatan antara kekuatan masyarakat/*civil society* dengan kekuatan pemerintah/negara),²⁰ yang memisahkan kekuasaan atas tiga kelembagaan terkait, yaitu: kekuasaan pemerintahan (eksekutif),²¹ kekuasaan membuat undang-undang (legislatif),²² dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Prinsip Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan mengandalkan partisipasi semua warga negara dalam berbagai aktivitas politik dalam pemilihan umum. Esensi dari partisipasi rakyat adalah keadilan dan kesejahteraan.

Sistem Demokrasi di Indonesia menganut lima prinsip pokok, yaitu: penghargaan pada setiap individu, kesetaraan semua orang, pemerintahan mayoritas dengan hak-hak minoritas, keharusan berkompromi, dan kebebasan individu. Aspek lain dari demokrasi adalah penguatan masyarakat (yang disebut masyarakat sipil) dalam berhadapan dengan pemerintah/negara (*political society*) dan pengusaha (*economical society*). Jika masyarakat sipil tidak kuat maka negara menjadi terlalu dominan dan bisa menjadi sewenang-wenang, akibatnya demokrasi lemah. Masyarakat sipil dapat terlibat dalam proses politik dengan menyampaikan aspirasi (misalnya melalui dialog maupun melakukan demonstrasi) dan komunitas iman percaya merupakan bagian dari masyarakat sipil.

⁹ Arief Budiman, *Demokrasi Atas, Bawah Dan Luar* dalam Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Komsumerisme (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 43.

¹⁰ S. H. Sarundjang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011), 149.

¹¹ S. H. Sarundjang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, 149.

Pemerintah merupakan suatu institusi yang merupakan perwujudan dari otonomi rakyat, sehingga berarti pemerintah memiliki otonomi yang memiliki tugas dan wewenang membuat kebijakan publik yang mengikat seluruh warganya.²³

“Politik Kristen” adalah segala sesuatu yang menunjukkan partisipasi orang Kristen dalam percaturan politik di Indonesia, baik melalui suatu partai politik, maupun secara pribadi, yang secara sadar mengedepankan nilai, visi atau simbol-simbol kekristenan dalam berpolitik. Partisipasi politik Kristen di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak adanya pemikiran atau gagasan mengenai Indonesia yang bersatu dan merdeka. Kalangan Kristen mula-mula menghimpun kekuatan politiknya dalam organisasi kesukuan yang terbuka kepada kebersamaan dengan warga non-Kristen, yaitu dengan adanya organisasi kesukuan seperti: organisasi masyarakat Batak, Maluku, Minahasa. Organisasi kesukuan tersebut pada awalnya bergerak dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut pada akhirnya berkembang sehingga terbentuknya Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tahun 1945 yang memobilisasi dukungan umat Kristen dan gereja-gereja terhadap kemerdekaan Indonesia. Partai Kristen semakin memilki tempat dalam percaturan politik dalam hal dapat memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Umum, antara lain: Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Partai Katolik Demokrat (PKD) pada pada Pemilu tahun 1999, Partai Damai Sejahtera pada Pemilu tahun 2004 dan Pemilu 2009, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) pada Pemilu tahun 2009.²⁴

Warga Kristen sebagai masyarakat majemuk perlu mengambil sikap yang jelas menyangkut keterlibatan gereja dalam politik. Sebagai warga Kristen tidak boleh

¹³ S. H. Sarundjang, *Babak Baru Sistim Pemerintahan* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011), 350-351.

¹⁴ M. Imaduddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia* (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), 101-102.

menutup mata dengan politik atau bersikap acuh dan tidak mau mengambil bagian dalam politik. Sebaliknya perlu berpartisipasi dalam politik meskipun tidak harus menjadi politisi. Mengingat bahwa yang berperan serta dalam politik adalah seluruh masyarakat yang majemuk maka tidaklah mudah bagi gereja dalam mengambil sikapnya. Etika politik pun dapat membantu penyelesaian masalah dalam politik bersama dengan gereja lewat para pemimpin-pemimpin gereja.

Implementasi PAK dan Politik di tengah Masyarakat Majemuk di Indonesia. Dalam konteks di Indonesia, etika politik Kristen harus bergerak dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristiani. Tidak hanya itu, dalam kehidupan masyarakat Kristen, pandangan terhadap politik itu sendiri masih menjadi beban. Laporan Departemen Pembinaan PGI tahun 80-an memperlihatkan beban itu: "Salah satu nilai lama yang perlu diperbaharui adalah sikap negative/pasif terhadap fungsi politik dalam kehidupan Kristen. Nilai-nilai lama (tradisional) perihal iman Kristen dan Politik semestinya sudah berlalu. Namun masih cukup bercokol dalam kehidupan gereja dan pula mempengaruhi sikap pemuda gereja."²⁵

Di tengah kondisi yang demikian gereja-gereja di Indonesia ternyata tidak memiliki suatu platform pendidikan politik warga jemaat, baik secara nasional melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) maupun sinode-sinode yang ada. Pada akhirnya pewarisan nilai lama yang tidak alkitabiah itu semakin bercokol, berhubung kosongnya upaya pendidikan politik. Proses-proses warga jemaat memasuki dunia politik tidak pernah dipersiapkan berdasarkan niat sadar, sengaja dan terencana. Kalaupun hal itu dilakukan, pada umumnya terjadi secara sporadis, tanpa perencanaan yang berkesinambungan.²⁶

Hal yang paling dibutuhkan saat ini bagi gereja-gereja di Indonesia adalah perubahan paradigma menuju suatu tatanan yang berangkat dari perspektif Alkitab.

Alkitab memahami manusia sebagai imago dei, maka pertama-tama hal itu harus dipahami sebagai status konfesi yang berlaku bagi semua manusia, tanpa memandang latar belakang apapun. Artinya, gereja-gereja harus dalam seluruh kehadirannya dengan segala harta yang harus dibayar. Kerusakan yang terjadi di dalam sistem politik dan perilaku aparat yang merusak "wajah Tuhan" melalui pelbagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat pada dasarnya adalah pertanda gereja itu tidak lagi memiliki pengaruh apa pun terhadap proses kehidupan itu sendiri.²⁷

Dalam buku *Fondasi Pendidikan Kristen* dikatakan bahwa Pendidikan Kristen harus memperhatikan area-area yang belum mendapat perhatian yang cukup. Hal ini terjadi sebagian disebabkan oleh sikap konservatif yang telah meluas melampaui kategori teologi untuk memuaskan semua area kehidupan. Dalam sikap seperti itu, manusia secara umum enggan untuk mempertanyakan identitas dan legitimasi mereka yang mengarahkan dan mengendalikan berbagai pelayanan pendidikan. Eggleston menyarankan agar mereka yang terpanggil untuk berada di posisi yang bertanggung jawab dan berkuasa harus dipertanyakan dan dievaluasi oleh mereka yang dilayaninya. Hal ini perlu dilakukan atas dasar alasan natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan konsekuensi kepemimpinan yang melampaui aspek moral. Banyak contoh di mana kepemimpinan Injil mengambil sikap otoriter yang tidak mau mengakui baik kelemahan maupun kekuatannya.²⁸

Adanya PAK akan membentuk suatu pembelajaran, dan pembelajaran itu merupakan perubahan perilaku kearah positif dalam konteks kekristenan. PAK dapat mempengaruhi perkembangan pribadi di segala aspek dan moral hidup dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang diharapkan. PAK dapat diajarkan kepada peserta didik dan mendorong mereka mengaktualisasi-

²⁵ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2000), 247.

²⁶ Ibid. 247-248.

²⁷ Ibid., 250.

²⁸ Robert Pzmino, *Fondasi Pendidikan Kristen*, (Jakarta, Gunung Mulia, 2012), 258-259,

kannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena agama merupakan acuan moral kehidupan manusia, tata nilai dalam kekristenan harus disampaikan dan menjadi fokusnya untuk memperteguh keyakinan dan tidak terpengaruh pada kondisi luar. Namun, PAK harus bisa disalurkan dalam kehidupan sosial untuk membangun masyarakat yang bermoral. Dengan demikian, bukan kondisi luar yang mempengaruhi peserta didik, melainkan PAKlah yang akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka sehingga menjadi bermoral.²⁹

Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi sarana bagi pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi salah satu area yang perlu disentuh oleh Pendidikan Agama Kristen dengan tujuan merubah pandangan orang Kristen yang belum paham tentang politik dan mengubah pandangan negatif masyarakat menjadi positif tentang politik. Sebagai siswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus pemerintahan maka perlu diajarkan bagaimana berpolitik yang benar sesuai dengan karakter Kristen. Jika sejak di sekolah telah diajarkan tentang pendidikan politik yang benar maka masalah yang berkaitan dengan politik tidak akan terulang kembali.

Pendidikan Politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Politik bertujuan membentuk dan menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi politik warga negara. Pendidikan politik membuat warga negara dapat mengenal dan memahami nilai-nilai sosial yang terkandung dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Dalam hubungan pendidikan politik dalam komunitas iman (warga gereja) secara khusus bertujuan menghubungkan atau menempatkan partisipasi politik komunitas iman dalam kerangka panggilan pelayanan komunitas iman (gereja). Panggilan umat Kristen dalam pembangunan Indonesia adalah membawa kebenaran dan keadilan bagi manusia

²⁹ Harianto, *Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini*, (Yogyakarta, Andi, 2012), 218.

Indonesia, serta keharmonisan dan kelestarian bagi tanah air Indonesia.³⁰

PAK memberikan pendidikan politik kepada komunitas iman atas pemahaman bahwa gereja tidak secara langsung terkait atau terlibat dalam politik kekuasaan. Gereja tidak boleh menjadi pendukung suatu partai politik, termasuk partai politik Kristen, dan tidak boleh mendukung calon-calon untuk posisi (legislative atau eksekutif. Gereja memiliki tugas mendorong komunitas iman (warga gereja) untuk menjalankan partisipasi politik secara cerdas dan berwawasan Kristiani. Komunitas iman (warga jemaat gereja) perlu mendapatkan pembinaan dalam berbagai aspek politik sehingga warga jemaat mempunyai kesadaran orientasi politik yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam proses-proses dan perkembangan politik.

PAK menanamkan nilai-nilai utama kader Kristen, yaitu: menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, berkomitmen, berani berkorban, menjunjung tinggi kesetaraan, cinta damai, anti kekerasan, peduli lingkungan, dll. PAK memberikan pendidikan mengenai politik dan partai politik, namun gedung gereja dan pertemuan ibadah gerejawi tidak boleh menjadi sarana kampanye suatu partai politik atau orang-orang yang menjadi calon legislatif, sekalipun yang menjadi calon legislatif adalah warga gereja yang diajukan oleh suatu partai politik dalam pemilihan umum. Gereja tidak boleh memihak salah satu partai politik atau memihak calon legislatifnya. Gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Gereja harus bersikap tegas memberikan peringatan untuk menolak segala sesuatu yang berhubungan dengan “politik uang”. Komunitas iman (gereja) sebaiknya tidak menerima sumbangan dalam bentuk apa pun dari suatu partai politik atau calon legislatifnya untuk “membeli suara” dalam pemilihan umum. PAK menjadi alat yang

¹⁶ Robert P. Borrong dan Jansen H. Sinamo, *Perspektif dan Peran Umat Kristiani Mewujudkan Indonesi Baru: Visi, Strategi dan Program Aksi Menyukkseskan Reformasi* (Jakarta: STT Jakarta, 2004), 28.

dipergunakan untuk menyampaikan amanat pengembalaan (surat pastoral) kepada komunitas iman (warga gereja) mengenai suatu kenyataan atas kegiatan politik. Harus berani untuk menyatakan suara kenabian kepada penguasa yang tidak menjalankan tugasnya semestinya dengan cara yang tidak berlawanan dengan etika Kristen maupun hukum yang berlaku. Suara kenabian diwujudkan komunitas iman (warga gereja) dalam politik demokratis adalah melalui advokasi (kebijakan, anggaran, kasus-kasus masalah sosial tertentu) dan juga melalui suatu tindakan unjuk rasa secara damai dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Gereja haruslah mendorong komunitas iman untuk mengembangkan semangat kemajemukan dalam hal hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat non-Kristen dalam lingkungan masing-masing, menyangkut kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk. Meningkatkan atau mengupayakan dialog dalam berbagai bentuk dan tingkatan dengan semua lapisan masyarakat majemuk atau antar umat beragama dalam memberikan atau mengembangkan informasi yang akurat mengenai berbagai perkembangan politik baik pada lingkup tingkat lokal, nasional, dan global. Membangun kesadaran komunitas iman untuk dapat mengupayakan usaha kemitraan dalam panggilan bersama untuk menegakkan keadilan dan mengusahakan kesejahteraan bagi semua orang (Kristen maupun Non-Kristen).

Politik bukanlah hanya merupakan strategi dalam hal perebutan kekuasaan. Politik adalah kebijaksanaan dalam mengupayakan kehidupan bersama di tengah masyarakat majemuk. Relevansi PAK dan Politik dalam masyarakat majemuk adalah adanya tindakan-tindakan komunitas iman atau partisipasi-partisipasi yang dilakukan dalam pembangunan berbangsa dan bernegara. Komunitas iman secara terus-menerus mengembangkan identitasnya sebagai komunitas percaya Kristus, komunitas kerajaan sorga yang mendatangkan *shalom* secara kreatif dan inovatif PAK memberikan pengajaran mengenai

adanya bermacam-macam ide, kepercayaan, dan nilai dari tradisi yang ada di tengah masyarakat majemuk karena Alkitab sendiri penuh dengan kisah yang memperlihatkan bagian-bagian mengenai kemajemukan dan keanekaragaman dalam dunia.³¹ Pengajaran mengenai perbedaan merupakan hal yang sangat penting karena sering terjadi dalam kenyataan kehidupan manusia yang bermasyarakat dan beragama (dalam kemajemukan masyarakat) sikap dan tindakan masyarakat yang mempolitikasikan agama atau membuat agama menjadi “kendaraan” dalam memenuhi ambisi politik kekuasaan. Ada beberapa kelompok di tengah masyarakat majemuk yang mempunyai keinginan untuk menunggalkan agama dengan cara memolitikkan agamanya. PAK dalam aktifitas politiknya di tengah masyarakat majemuk yang memiliki kemajemukan agama seharusnya menyuarakan persatuan dan bukan keseragaman serta mengupayakan persatuan dalam saling berbagi (Flp. 2: 1-3).³² PAK membuka wawasan bahwa sebagai komunitas iman dalam tubuh Kristus sebagai warga Kerajaan Allah dan juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab di tengah masyarakat majemuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya ikut serta dalam kegiatan politik.

SARA dapat menjadi komoditas bagi penguasa untuk memperoleh tujuan dan ambisi politik.³³ Mengingat SARA dapat dijadikan “tunggangan politik” maka, PAK dapat menjadi “jembatan” yang mengupayakan terjadinya dialog antar umat beragama dan segala usaha dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Para pemuka atau pemimpin agama sebagai tokoh yang menjadi teladan masyarakat beragama dari seluruh agama yang ada di

¹⁷ Hope S. Antone, *Pendidikan Kristiani Kontekstual Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan Dalam Pendidikan Agama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 71.

¹⁸ C. Kiswara, *Gereja Memasyarakat Belajar dari Kisah Para Rasul* (Yogyakarta: Kanisius, 1988),

¹⁹ Olaf H. Schumann, *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamain* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 494.

Indonesia perlu terus menerus melakukan dialog dan membangun kemitran antara seluruh masyarakat majemuk di Indonesia. Pemuka agama diharapkan dapat menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah kehidupan beragama untuk menghilangkan sikap kecurigaan dan mematahkan aktivitas provokasi negatif antara pemeluk agama di tengah masyarakat majemuk di Indonesia karena kerukunan umat beragama merupakan prasyarat suksesnya pembangunan di Indonesia.³⁴ Demikian pula dengan pemerintah dan warga negara dalam masyarakat majemuk, pemerintah bertanggung jawab mengawal politik kebangsaan dengan konsisten dan warga negara bertanggung jawab memelihara kepentingan bangsa di atas egoisme kelompok, demi berjalannya dan bertumbuhnya pembangunan bangsa yang berkelanjutan.³⁵ Dengan demikian PAK dan politik dalam kehidupan masyarakat majemuk haruslah dapat mewujudkan amanat Tuhan di tengah dunia.

Kesimpulan

PAK dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia. Keduanya tidak bertentangan atau berlawanan, sehingga warga gereja tidaklah perlu untuk mengambil sikap seperti a-politik, yang beranggapan bahwa politik adalah urusan duniawi maka gereja tidak perlu terlibat dalamnya, ataupun beranggapan bahwa politik itu kotor. Tuhan mengamanatkan supaya umatnya men-sejahterahkan kota (polis/politik), berarti politik berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat atau warga sebagai perwujudan

perintah Tuhan. Sikap gereja terhadap politik ditempatkan dalam pemahaman fundamental dan fungsional atas keberadaannya untuk memberikan tanggapan baik positif maupun aktif terhadap karya penyelamatan Allah.

Tujuan PAK dalam keterlibatan warga gereja terhadap politik di Indonesia adalah tujuan pelayanan/pembebasan, missioner, korektif, normative dan edukatif. Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi sarana bagi pendidikan politik. Pendidikan politik menjadi salah satu area yang perlu disentuh oleh Pendidikan Agama Kristen dengan tujuan merubah pandangan orang Kristen yang belum paham tentang politik dan mengubah pandangan negatif masyarakat menjadi positif tentang politik. PAK menanamkan nilai-nilai utama kader Kristen, yaitu: menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, berkomitmen, berani berkorban, menjunjung tinggi kesetaraan, cinta damai, anti kekerasan, peduli lingkungan, dll.

Gereja memiliki tugas mendorong komunitas iman (warga gereja) untuk menjalankan partisipasi politik secara cerdas dan berwawasan Kristiani. Komunitas iman (warga jemaat gereja) perlu mendapatkan pembinaan dan pengajaran dalam PAK terhadap berbagai aspek politik sehingga warga jemaat mempunyai kesadaran orientasi politik yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam proses-proses dan perkembangan politik.

Daftar Pustaka

- Antone, Hope S. *Pendidikan Kristiani Kontekstual Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan Dalam Pendidikan Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Borrong, Robert P. dan Jansen H. Sinamo, *Perspektif dan Peran Umat Kristiani Mewujudkan Indonesi Baru: Visi, Strategi dan Program Aksi Menyukkseskan Reformasi*. Jakarta: STT Jakarta, 2004.

²⁰ Hasbullah Mursyid, Amidhan, Moeslim Abdurahman, Zainal Arifin (ed), *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departem Agama R.I., 1979), hlm. 22.

²¹ Yonky Karman, *Republik Galau Merajut Asa: Esai-Esai tentang Negara, Bangsa, dan Kemepimpinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 124.

- Budiman, Arief. *Demokrasi Atas, Bawah Dan Luar dalam Reformasi Politik Kebangkitan Agama dan Komsumerisme*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Hill, Michael. *The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics*. Australia: Matthias Media, 2001.
- Hoekema, Anthony. *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*, terj. Irwan Julianto. Surabaya: Momentum 2000.
- Homrighausen, E.G. dan I. H. Enklaar, *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Karman, Yonky. *Karman, Republik Galau Merajut Asa: Esai-Esai tentang Negara, Bangsa, dan Kemepimpinan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Kiswara, C. *Gereja Memasyarakat Belajar dari Kisah Para Rasul*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Mursyid, Hasbullah., Amidhan, Moeslim Abdurahman, Zainal Arifin (ed), *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departem Agama R.I., 1979.
- Nasution, M. Imaduddin. *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia*. Jakarta: Verbum Publishing, 2012.
- Sarundjang, S. H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011.
- Sarundjang, S. H. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011.
- Schumann, Olaf H. *Agama-Agama Kekerasan dan Perdamain*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Antara Tuhan Dan Peluru Serdadu*. Bandung: HKBP Bandung Reformanda, 2016.
- Sirait, Saut. *Theologi Kenegaraan: Negara Dalam Rancangan Tuhan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Sri, Dewi. *Hubungan Gereja Dengan Negara Menjuju Indonesia Baru*. Medan: Atalya Rileni Sudeco, 2000.
- Stott, John . *Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer*, terj. G.M.A Nainggolan. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005.
- Wright, Christopher. *Hidup Sebagai Umat Allah*, terj. Liem Sien Kie. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.